

## Dilema Elite Politik dan Kekuatan Media Massa

ADHI IMAN SULAIMAN<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman,  
Jl. Prof. Dr. Boenyamin No 993, Purwokerto, Jawa Tengah 53122  
Email: adhi\_iman@yahoo.com

### Abstract

The dominance of the political drama in the media seemed to be the evidence of a democratic process in which the political actors are always racing to win popularity or good imaging of themselves either individually or collectively (political party). However, the political drama is increasingly showing an interest gap, where the people actually crave affairs and social developmen. This is the rare serious discussion covered by the mass media, because it is less interesting than the debate of political and legal problems, or that reality is really no serious struggle about the fate of the people's welfare. Democracy is not for any political and legal issues as well as press freedom, but democracy is to answer how people could be prospered by the government and the representatives (political elites) who carry out the mandate of the people through elections.

Kata kunci: Political drama, mass media, social development, welfare

### I. PENDAHULUAN

Melalui teropong analisis agenda seting media massa, bangsa ini selalu dipertontonkan, dan seperti terjebak oleh permainan drama panggung politik yang selalu menjadi kamufase demokrasi politik, seakan masih jauh dari perjuangan menuju perbaikan dan kemajuan mengenai kesejahteraan rakyat. Karena hakekatnya drama politik adalah drama perebutan dan memertahankan kekuasaan (*power*), keabsahan (*legitimate*) dan kewenangan (*authority*). Hal tersebut terjadi karena media massa dengan pemberitaannya diyakini oleh banyak orang (termasuk banyak pembuat keputusan) sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya (Severin, 2007: 266). Perspektif teori komunikasi massa yang menempatkan media massa

yang linier terhadap khalayaknya seperti teori agenda setting dari Walter Lyppmann (1922) yang menyatakan bahwa media bertanggung jawab pada apa yang ada dibenak khalayak (*picture in our head*).

Cohen (1963) mengartikulasikan lebih jauh ide Lyppmann itu, ketika dia menyatakan bahwa media mungkin tidak selalu sukses dalam mengajak khalayak untuk berpikir apa (*what to think*), tetapi mereka selalu sukses dalam mengajak khalayak untuk berpikir tentang apa (*what to think about*) (Rogers, 1993: 68). Konsep "*what to think about*" berarti pembedaan atas apa yang dianggap menonjol dalam pemberitaan, yang dioperasionalkan sebagai apa yang dianggap penting oleh media dan kemudian diafirmasi oleh khalayak (Edelstein, 1993: 85). Pada teori agenda setting khalayak adalah objek yang mudah sekali diterpa atau dipengaruhi

oleh agenda yang diberitakan media massa, karena sifat khalayak yang dianggap pasif. Teori yang sama dengan pandangan tersebut adalah teori peluru, yang menganggap efek media massa terhadap khalayak sangat kuat dan media memiliki pengaruh yang tidak terbatas (*unlimited effect*) serta pengaruh yang kuat (*powerful effect*).

Bukti drama politik dalam agenda seting media, yaitu hampir sepanjang tahun 2009 drama politik berlangsung baik di tingkat nasional sampai ketingkat lokal yaitu lewat panggung pemilihan umum (Pemilu) legislatif, Pemilihan Presiden (Pilpres) dan di daerah dengan adanya drama politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kemudian drama politik lainnya yang sangat spektakuler atau menghebohkan seperti kasus "kriminalisasi KPK" berlanjut ke kasus "cecak dan buaya", kasus "Antasari Azhar", kemudian kasus "Bank Century" yang sangat fenomenal dengan hampir satu bulan lebih drama politik tersebut berlangsung di Pansus Century, sampai mendatangkan aktor-aktor politik sekaliber wapres dan menteri keuangan, serta BPK hingga puncaknya pada drama voting DPR.

Selanjutnya, kasus "Yusril versus Jaksa Agung", Kasus "Pergantian dan Penyeleksian Kapolri" sampai batalnya kunjungan SBY ke Belanda karena ada informasi akan ada persidangan mengenai RMS di Belanda. Belum lagi drama-drama politik lainnya yang semuanya berlomba untuk meraih pencitraan prestis sebagai partai politik besar dengan mempertontonkan pemilihan ketua umum partai politik yang diseting begitu dramatis dan fantastis. Sampai drama politik menggelikan, memilukan sekaligus memalukan, yaitu terjadinya peristiwa adu argumen yang telah melanggar etika dan kesantunan dengan berkata kotor, kasar atau tidak senonoh yang dilakukan oleh parlemen (DPR yaitu Pansus Century). Fenomena tersebut sebetulnya sangat bagus dalam konteks pendidikan politik, tetapi bukan berarti menjadi tayangan yang seakan wajib, sangat vital dan strategis. Karena yang lebih penting adalah bagaimana memperjuangkan peningkatkan kesejahteraan

an rakyat secara nyata, yang seakan nyaris seperti tidak menarik media massa untuk memberitakannya atau justru karena memang benar-benar tidak ada realitas peristiwa para elit politik, pemerintah dan wakil rakyat memperjuangkan nasib serta kesejahteraan rakyat.

Drama politik di media massa harus disadari sebagai bentuk perlombaan mencapai pencitraan di atas panggung politik semata sebagai wilayah depan, dimana khalayak tidak mengetahui realitas sebenarnya di panggung belakang. sebagaimana menurut Goffman (Mulyana, 2006: 114) bahwa kehidupan sosial itu dapat dibagi menjadi "wilayah depan" (*front region*) dan "wilayah belakang" (*back region*). Beradu argumen dan perdebatan sengit yang terjadi di parlemen (DPR) yang ingin membuktikan siapa yang paling demokratis, Namun kenyataannya bisa saja terjadi loby dan kompromi politik atau bahkan berkonspirasi politik di belakang panggung yang semua berperan sebagai aktor wakil rakyat tetapi hakikatnya wakil partai yang tidak bisa lepas dari garis komando (keputusan) partai politik lewat fraksi di DPR.

Maka menjadi sebuah dilema elit politik dan kekuatan media massa, jika "berbicara dan bekerja" mengenai nasib rakyat dan bangsa ini, hanya ramai membahas bidang politik dan hukum semata sebagai proses perebutan dan mempertahankan kekuasaan para elit politik. Terlebih pemberitaan di bidang keamanan dengan munculnya terorisme dan rakyat hanya menjadi penonton setia, dan seakan tidak bisa menolak kalau setiap harinya "terlena" oleh perhelatan drama politik yang selalu mengatasnamakan demokratisasi Hal inilah yang menjadi dilema elit politik dan kekuatan media massa.

## II. PEMBAHASAN

### A. Aktor Politik dan Kekuatan Media Massa dalam Drama Politik

Drama demokrasi politik yang diperankan merupakan pola saling

menguntungkan antara elit politik dan media massa. Elit politik atau penguasa yang hakikatnya sebagai pengemban amanat (kedaulatan) rakyat, selalu mempertontonkan drama politik seperti di gedung parlemen (DPR) yang selalu ditayangkan, juga acara-acara talkshow, dialog dan debat publik yang terkadang disiarkan secara langsung, semua drama tersebut yang sarat dengan saling memengaruhi dan bernuansa perebutan kekuasaan, keabsahan serta kewenangan.

Media massa, khususnya televisi memanfaatkan drama politik para elit tersebut dengan memiliki kekuatan daya jangkauan luas, dikemas dengan begitu menarik dan bisa diakses secara mudah oleh khalayak. Kekuatan media massa tersebut dianggap sebagai "*silent revolutions*" oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI, 16 Oktober 2008), yang melakukan survei tentang media dan kekuatan parpol menuju pemilu 2009 bahwa media massa, terutama televisi, menggantikan fungsi organisasi partai politik untuk menjangkau calon pemilih.

Lembaga yang paling bisa menyuarakan keinginan rakyat adalah media massa sebesar 31%, ormas 24%, birokrasi 11%, parpol 11% dan yang menjawab tidak tahu 23%. Ini mendeskripsikan keyakinan pada kemampuan media massa dalam menyuarakan rakyat jauh lebih dominan.

Hasil lainnya tentang keyakinan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang dianggap sesuai dengan peranannya, bahwa televisi sebesar 76,5%, koran 72%, radio 72%, LSM 61%, ormas 57%, birokrasi 53% dan partai 42% (<http://www.lsi.co.id>, diunduh pada April 2009).

Kemudian bangsa ini seperti membuat kecemburuan sosial-ekonomi ketika acara infotainment yang selalu menyuguhkan kesuksesan, dan berlimpahnya kekayaannya di tengah masyarakat pada sisi lain dalam pengemasan berita tentang kemiskinan dan pengangguran. Sebagaimana dalam pendekatan Teori Dependensi Mengenai Efek Komunikasi Massa yang dikembangkan oleh Sandra Ball Rokeach dan Malvin L.

DeFleur (Sandjaja, 1994: 200), yang memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek komunikasi massa. Pemikiran terpenting dalam teori ini adalah bahwa dalam masyarakat modern, audiens menjadi tergantung pada media massa sebagai sumber informasi bagi pengetahuan tentang, dan orientasi kepada apa yang terjadi dalam masyarakatnya.

Jenis dan tingkat ketergantungan akan dipengaruhi oleh sejumlah kondisi struktural, meskipun kondisi terpenting terutama berkaitan dengan tingkat perubahan, konflik atau tidak stabilnya masyarakat tersebut. Keduanya berkaitan dengan apa yang dilakukan media yang melayani berbagai fungsi informasi.

Teori ini menjelaskan saling berhubungannya tiga perangkat variabel utama dan menentukan jenis efek tertentu sebagai hasil interaksi antara tiga variabel tersebut. Hal tersebut diperkuat oleh teori ketergantungan komunikasi politik pada media massa (Littlejohn, 1996: 348) bahwa dalam sistem politik terdapat interaksi yang saling berkaitan satu sama lain antara sistem sosial yang terdapat struktur sosial budaya, struktur politik, dan struktur ekonomi dengan sistem media yang memiliki kekuatan dan pengemasan daya tarik isi berita, struktur dan fungsi. Kedua sistem tersebut menjadi ketertarikan dan kebutuhan khalayak yang konsekuensinya akan memengaruhi faktor kognitif (pemikiran), afektif (perasaan) dan behavioral (perilaku).

Kemudian kekuatan media massa juga didukung dan dimiliki pemilik modal, seperti pendapat Altschull (1985) bahwa (1) dalam semua sistem pers media berita mewakili pihak yang menjalankan kekuasaan politik dan ekonomi. Surat kabar, majalah dan outlet penyiaran bukanlah aktor independen, meski mereka memunyai potensi untuk menjalankan kekuasaan independen; (2) Isi berita selalu menunjukkan kepentingan dari orang-orang yang membiayai pers; (3) Semua sistem pers didasarkan pada kepercayaan ekspresi bebas, walaupun

didefinisikan dengan cara yang berbeda. Sehingga Altschull menyimpulkan, "Sejarah pers menunjukkan bahwa surat kabar dan variasi model cenderung mementingkan kepentingan pemilik, sedangkan pada saat yang sama melanggengkan kesan bahwa pers adalah untuk melayani pengguna kepentingan berita. Terlalu berangan-angan bila berharap bahwa media berita akan berbelok 180° dan mencemooh keinginan pemilik" (dalam Severin & Tankard, 2007: 284).

Hal senada bisa dilihat dari pendekatan analisis wacana kritis bahwa penelitian media massa lebih diletakkan dalam kesadaran bahwa teks (wacana) dalam media massa memunyai pengaruh yang sedemikian rupa pada manusia.

Seluruh aktivitas dan pemaknaan simbolik dapat dilakukan dalam teks media massa. Pada dasarnya teks media massa bukan realitas yang bebas nilai. Pada titik kesadaran pokok manusia, teks selalu memuat kepentingan. Teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas yang memihak. Tentu saja teks dimanfaatkan untuk memenangkan pertarungan idea, kepentingan atau ideologi tertentu kelas tertentu. Pada titik tertentu, teks media pada dirinya sudah bersifat ideologis (Littlejohn, 1996: 163 dan 217).

Rakyat disetting oleh agenda drama politik yang sangat dominan, selalu dijadikan pemberitaan dalam media massa disengaja atau tidak membangun dependensi efek komunikasi massa akan drama politik (drama perebutan dan mempertahankan kekuasaan), sehingga melupakan agenda revitalisasi yang strategis, yaitu pembangunan sosial berorientasi kesejahteraan yang berkeadilan, dan adil dalam pemerataan. Karena media massa bukan hanya sekedar media informasi tanpa tendensi kepentingan yang diinginkan media itu sendiri, maka media massa bisa menonjolkan atau menenggelamkan peristiwa atau seseorang. Kebenaran realitas akan dikonstruksi oleh media massa sendiri menjadi benar atau salah, besar atau kecil sebuah peristiwa yang terjadi. Mulyana (2008

: 13) menyatakan, makna suatu peristiwa yang diproduksi dan disebarluaskan oleh media massa, sebenarnya adalah suatu konstruksi yang temporer, rentan dan kadang mustahil.

Berita televisi sebenarnya merupakan laporan peristiwa yang artifisial, tetapi dapat diklaim sebagai objek oleh televisi itu untuk mencapai tujuan-tujuan ideologis dan bisnis televisi. Dengan kata lain, berita televisi bukan sekedar menyampaikan, melainkan juga menciptakan makna.

#### B. Harus Serius Membahas Revitalisasi Pembangunan Sosial

Pembahasan mengenai revitalisasi pembangunan sosial, perlu mendapat perhatian dan kajian serius bagi semua elemen bangsa, termasuk para elit politik yang selama ini mengemban amanah rakyat dan media massa. Tegaknya tertib hukum yang menciptakan keamanan dan kenyamanan yang juga terkontrol lewat media massa, rasanya belum cukup tanpa menciptakan kesejahteraan hidup. Kajian mengenai kesejahteraan tidak akan lepas dari masalah sosial dan ekonomi, seperti beberapa temuan riset menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi penting bagi pembangunan sosial. Sebaliknya, pembangunan sosial juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ranis & Stewart (1999) dalam *The Asian Crisis and Human Development* menyatakan bahwa pembangunan manusia mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Adapun program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Ketenagakerjaan; (4) Perumahan dan Pengentasan kemiskinan.

Kemajuan teknologi yang merupakan tuntutan dan tantangan di era globalisasi ini bisa disinergikan dengan program agroindustri. Kekuatan ekonomi rakyat yang bersumber dari pertanian, perkebunan dan perikanan didukung oleh teknologi, idealnya

ada 4 (empat) Agroindustri yang meliputi: pertama, agroindustri pengolahan hasil pertanian; kedua, agroindustri yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian; ketiga, agroindustri input pertanian (pupuk, pestisida, herbisida dan lain-lain) dan keempat, agroindustri jasa sektor pertanian (*supporting services*).

Sebagaimana dalam konsep oprasional pembangunan di Indonesia (Sumadinigrat, Bugroho, dan Wirahatnolo, 2005: 210-211) yang harus berperan adalah (1) Peran pemerintah yang mengurus regulasi, pelayanan dan fasilitasi pemetaan kembali kondisi masyarakat (pemberdayaan ekonomi rakyat); (2) Peran dunia usaha, dengan memberikan penguatan usaha mikro kecil dan menengah yaitu penyediaan dana perbankan, bantuan teknis dan pendampingan bagi usaha *micro*; (3) Peran Masyarakat, yaitu Pertama, dengan melakukan advokasi oleh organisasi nonpemerintah. Kedua, melakukan asistensi dan pendampingan baik secara individual dan kelembagaan. Ketiga, melakukan kontrol sosial mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan melalui mekanisme partisipatori.

#### C. Perbedaan Orientasi Kesejahteraan

Terjadi jarak yang sangat jauh antara orientasi yang diinginkan atau dihadapi oleh rakyat dengan elit penguasa sebagaimana dalam teori Maslow (Rakhmat, 2007: 37). Sehingga rakyat masih bekuat di level pemenuhan kebutuhan fisiologis seperti sandang, pangan, dan papan, kemudian ditambah dengan kebutuhan memebuhi kebutuhan keamanan dan keselamatan. Sedangkan para elit penguasa berorientasi pada kebutuhan yang lebih dari yang dihadapi rakyat yaitu pemenuhan kebutuhan penghargaan yang bersifat prestisius seperti butuh pujian, penghormatan, penghargaan, hadiah dan tanda jasa. Selanjutnya elit penguasa juga berorientasi untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri sesuai keinginannya, seperti menjadi penguasa "selama-lamanya" di berbagai level posisi

baik dirinya sendiri atau memasang orang lain (menjadi sponsor),

Perbedaan orientasi antara elit politik (penguasa) dengan rakyat (dikuasai) yang justru terciptanya ketidakpuasan atau respon negatif terhadap kinerja elit politik. Sebagaimana data dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada awal Mei 2008 bahwa perbandingan kondisi saat ini dibandingkan sebelum reformasi, yang paling dominan menjawab justru 58,30% menjawab lebih baik pada saat orde baru, yang menjawab kondisi saat ini lebih baik hanya 15,51% saja. Kesimpulannya, publik belum puas dengan perkembangan reformasi yang sudah berusia 10 tahun.

Ketidakpuasan ini tampaknya lebih dipicu oleh kondisi saat ini yang dinilai tidak lebih baik dibandingkan dengan masa sebelum reformasi (masa Orde Baru Soeharto). Mayoritas publik justru menilai kondisi di bawah Soeharto lebih baik dibandingkan dengan masa saat ini. Pandangan semacam ini harus ditafsirkan sebagai cerminan pandangan publik yang menilai reformasi selama ini tidak banyak menyentuh perbaikan kehidupan mereka. Kondisi ekonomi rumah tangga mereka tidak jauh lebih baik setelah reformasi seperti kenaikan harga barang kebutuhan pokok, pendidikan yang makin mahal dan lapangan pekerjaan makin sulit dicari. Berbagai kemajuan yang telah dicapai selama 10 tahun reformasi ini (mulai dari adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, kebebasan pers, penghapusan dwifungsi ABRI, otonomi daerah, pemisahan polisi dari TNI dan sebaainya) tidak dirasakan secara langsung dampaknya bagi publik. Berbagai kemajuan reformasi itu, jika dilihat lebih banyak dinikmati oleh elit. Otonomi daerah misalnya, selama ini banyak dinikmati oleh elit lokal. Pemilihan kepala daerah juga lebih banyak dimanfaatkan oleh elit.

#### D. Revitalisasi Kader dan Kepemimpinan Bangsa

Peran aktor elit politik dalam drama politik yang didukung oleh kekuatan dan

orientasi media massa, dimana peran dan fungsinya selain sebagai pendidikan politik, juga dituntut supaya bisa menyuguhkan bukti kerja serius memikirkan nasib rakyat berupa konsep ekonomi kerakyatan dengan program agroindustri. Ada hal yang sangat pentingnya lainnya yaitu bagaimana menghadapi krisis kepemimpinan dan krisis kaderisasi. Jangan sampai pemilu dan pemilihan presiden dan wakil presiden tetap didominasi oleh "pemain lama" yang sebetulnya sah-sah saja dan wajar setiap warga negara mencalonkan dan dicalonkan di era demokratisasi. Namun jika level generasi penerus tidak berani atau tidak diberi kesempatan untuk maju dicalonkan atau mencalonkan.

Pemimpin, dalam arti elit politik bisa dikatakan "gagal" karena tidak berhasil menciptakan atau memberikan kesempatan kepada generasi penerus atau kadernya untuk melanjutkan estapet kepemimpinan. Walaupun sudah memulai pengkaderan untuk mempersiapkan dinasti kekuasaan politik, tetapi kesempatan yang ada masih kental dan kuat jalur unsur kekeluargaan dan kekerabatan. Bangsa ini membutuhkan generasi penerus untuk pemimpin yang memiliki kepribadian (moral), kemampuan, kepedulian dan kejujuran serta teruji secara matang menyelesaikan masalah nasib rakyat.

Janganlah bangsa ini banyak yang bisa menjadi "Penguasa" tetapi tidak bisa "Memimpin". Jika penguasa atau pola kepemimpinan kekuasaan yang lahir maka terdapat ciri-cirinya dalam satu periode (5 tahun) lima fase program, yaitu (1) Tahun pertama bagaimana membalas budi bagi para pendukung politik dengan membagikan kue kekuasaan atau proyek kekuasaan, (2) Tahun kedua, merealisasikan janji-janji kepada konstituen tetapi yang bersifat populis/pencitraan bukan substansial, (3) Tahun ketiga mencoba mengembalikan modal politik yang kemarin diinvestasikan untuk meraih kekuasaan, (4) Tahun keempat, bagaimana mendulang keuntungan politik untuk mempersiapkan modal politik periode berikutnya, (5) Tahun kelima, mencuri "start kampanye" dengan rajin turun ke masyarakat untuk meraih dukungan kembali dengan dalih

melaksanakan tugas dan program kerja. Hal tersebut merupakan tipe kepemimpinan transaksional (*transactional leadership*) yaitu gaya kepemimpinan antara politisi dengan saudagar, penguasa dengan pengusaha atau antara pemimpin dengan konstituen maupun antara pemimpin dengan elit politik lainnya yang dilandasi oleh semangat pertukaran kepentingan ekonomi atau politik. Idealnya bangsa ini membutuhkan kader pemimpin yang bersifat transformasional, sebagaimana menurut Burn (1978). Model kepemimpinan transaksional terjadi ketika pola relasi antara pemimpin dengan konstituen, maupun antara pemimpin dengan elit politik lainnya dilandasi oleh semangat pertukaran kepentingan ekonomi atau politik untuk memelihara atau melanjutkan *status quo*. Sedangkan model kepemimpinan transformasional bekerja menuju sasaran pada tindakan mengarahkan organisasi kepada suatu tujuan yang tidak pernah diraih sebelumnya.

### III. PENUTUP

Eksistensi dan peran elit politik (penguasa) sebagai pemegang amanah rakyat lewat proses demokrasi melalui pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada harus secara serius dan fokus bekerja (berjuang), khususnya di bidang pembangunan, untuk kesejahteraan lewat konsep ekonomi kerakyatan yang tidak anti industrialisasi tetapi tetap memanfaatkan kebutuhan dan tuntutan teknologi dengan program agrobisnis. Sehingga elit politik berperan dan beraktualisasi bukan hanya dalam masalah politik dan hukum yang selama ini sangat dominan diperankan untuk pencitraan politik yang mendapat dukungan secara dominan atas kekuatan media massa.

Pendidikan politik dan sosialisasi politik bisa diperankan oleh aktor elit politik dan media massa, tetapi ada yang begitu penting lagi yaitu elit politik bersungguh-sungguh menjalankan amanah, dengan melakukan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat serta menyiapkan atau memberikan kesempatan bagi kader bangsa kedepan. Semua itu harus didukung oleh kekuatan

media massa, yang juga memiliki semangat memberikan optimisme dan motivasi untuk membangun bangsa ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Edelstein, A. S. (1993) Thinking About the Criterion Variable in Agenda-Setting Research, *Journal of Communication*. Vol 43
- Littlejohn, S. (1996) *Theories of Human Communication*. California: Wadsworth Publishing Company.
- McQuail, D. (1991). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyana, D. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung Remaja Rosdakarya.
- . (2008) *Komunikasi Massa. Kontroversi, Teori, dan Aplikasi*, Bandung: Widya Padjadjaran
- Rakhmat, J. (2007). *Psikologi Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Rogers, E. M & Dearing, J. W. (1993) *The Anatomy of Agenda setting Research*, *Journal of Communication* Vol 43.
- Senjadaja, D. (1994) *Teori Komunikasi*. Jakarta: Modul Universitas Terbuka.
- Severin, Werner J dan Tankard, James W. (2007). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Harapan di dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sumodiningrat, G., Nugroho, D, R., dan Wrihatnolo, R. R. (2005). *Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Nehara-Bangsa yang Unggul dalam Persaingan Global*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Sumber lain:
- Kompas 7 Oktober 2010
- Sugiarto, B. A. (2010) Direktur Eksekutif *Lead Institute* Universitas Paramadina, tentang "Menuju Kepemimpinan Transformasional" September
- Suharto, Edi. (2005b). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta
- . (2006a). "Peta dan Dinamika *Welfare State* di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia?", makalah disampaikan pada Seminar *Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Edi Suharto/WelfareStateDepsos/2006 21 Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia*, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006. Dalam <http://www.depsos.go.id/unduh/NegaraKesejahteraan.pdf>,
- Lingkaran Survei Indonesia, (2009) <http://www.lsi.co.id>, di unduh pada April.



raih masa depan  
di kampus terdepan

Rektor dan Pimpinan Yayasan Unisba

*Mengucapkan*

Selamat atas Terakreditasinya

Jurnal MIMBAR Unisba

Rektor,

Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoerie, MS., Sp.THT-KL (K)

Ketua Yayasan Unisba,

Prof. Dr. H. Miftah Faridl

ISSN 0215-8175